

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk dengan jumlah yang padat. Menurut World Bank (2022) Indonesia menduduki peringkat empat dunia dengan jumlah penduduk sebanyak 275,501,339 jiwa. Negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar tentu memiliki banyak keuntungan, salah satunya yakni dengan melimpahnya Sumber Daya Manusia. Namun permasalahan timbul ketika Sumber Daya Manusia yang dimiliki tidak memiliki kualitas yang baik. Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah investasi bagi suatu Negara. Upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan, tenaga kerja, dan sektor-sektor pembangunan lainnya (Mulyadi, 2003). Sektor pendidikan adalah bagian yang krusial dalam tujuan pembangunan suatu Negara. Tidak dapat dipungkiri melalui sektor pendidikan sebagai penyumbang besar kemajuan suatu Negara (Zahra, 2019).

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting yang terus diupayakan oleh pemerintah demi memperbaiki mutu masyarakat Indonesia. Setiap masyarakat Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional yang menetapkan bahwa pemerintah berkewajiban memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (Elfarabi, 2018).

Namun realitanya, masyarakat sendiri enggan mendukung sepenuhnya dalam mengupayakan perbaikan kualitas pendidikan. Hal tersebut menunjukkan

bahwa berbagai kendala dalam upaya peningkatan mutu pendidikan salah satunya karena rendahnya peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan (Rahmatin & Soejoto, 2017). Untuk melihat seberapa besar kemajuan sektor pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah jumlah penduduk melekaksara yang terlibat dalam kegiatan memperoleh pendidikan usia 16—18 tahun atau setara dengan pendidikan sekolah menengah atas (SMA/SMK). Peningkatan angka partisipasi sekolah (APS) juga merupakan tolak ukur keberhasilan pendidikan suatu daerah yang ada di Indonesia.

Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh, semakin kecil angka partisipasi sekolah yang disumbangkan. Maka tidak selalu meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti pendidikan seluruh daerah merata. Maka sebaiknya pendidikan perlu diperhatikan jika masih banyak daerah yang kecil presentase partisipasi sekolahnya artinya program pemerintah dalam sektor pendidikan belum berhasil. Belum berhasil dikarenakan tinggi rendahnya mutu pendidikan dilihat sejauh mana pemerataan pendidikan untuk anak Indonesia. Selain itu Putus Sekolah juga sebagai salah satu alasan rendahnya partisipasi sekolah (Zahra, 2019). Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tingkat partisipasi sekolah di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :



**Gambar 1.1**

**Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 di Indonesia Tahun 2017-2022**

*Sumber :BPS, 2022*

Berdasarkan gambar 1.1 terlihat bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Indonesia mengalami perkembangan yang selalu meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Angka partisipasi sekolah tertinggi pada tahun 2022 sebesar 73,15% sedangkan angka partisipasi sekolah terendah pada tahun 2017 sebesar 71,42%.

Dari hasil data tersebut menunjukkan bahwa tingginya perkembangan jumlah partisipasi sekolah kelompok umur 16-18 tahun setiap tahunnya. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh, semakin kecil angka partisipasi sekolah yang disumbangkan. Maka tidak selalu meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti pendidikan seluruh daerah merata. Maka sebaiknya pendidikan perlu diperhatikan jika masih banyak daerah yang kecil presentase partisipasi sekolahnya artinya program pemerintah dalam sektor pendidikan belum berhasil.

Belum berhasil dikarenakan tinggi rendahnya mutu pendidikan dilihat sejauh mana pemerataan pendidikan untuk anak Indonesia. Selain itu pendapatan perkapita juga sebagai salah satu alasan rendahnya pasrtisipasi sekolah. Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Untuk mengetahui tingkat perkembangan pendapatan penduduk suatu daerah secara rata-rata dapat digunakan angka PDRB per kapita (Mustika, 2009). Pendapatan per kapita yang meningkat merupakan salah satu tanda bahwa rata-rata kesejahteraan penduduk telah meningkat. Pendapatan perkapita menunjukkan pula apakah pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah telah berhasil, berapa besar keberhasilan tersebut, dan akibat apa yang timbul oleh peningkatan tersebut.



**Gambar 1.2**

**Pendapatan Perkapita Indonesia Tahun 2017-2022 (Ribu Rupiah)**

*Sumber : BPS, 2022*

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat pendapatan perkapita Indonesia tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Pendapatan perkapita Indonesia pada tahun 2017 sebesar 37,581.37 ribu rupiah, pada tahun 2018 pendapatan perkapita

sebesar 39,340.56 ribu rupiah, pada tahun 2019 pendapatan perkapita naik sebesar 41,021.61 ribu rupiah. Kemudian pada tahun 2020 pendapatan perkapita turun sebesar 39,788.89 ribu rupiah, pada tahun 2021 pendapatan perkapita naik sebesar 40,775.89 ribu rupiah. dan pada tahun 2022 pendapatan perkapita kembali naik sebesar 42,463.78 ribu rupiah.

Kecilnya pendapatan perkapita di Indonesia disebabkan karena sebahagian mayoritas penduduk menerima penghasilan dari bertani sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Namun disamping pendapatan perkapita, anggaran pemerintah juga salah satu pendorong dalam peningkatan partisipasi sekolah di Indonesia. Khususnya pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan.



**Gambar 1.3**

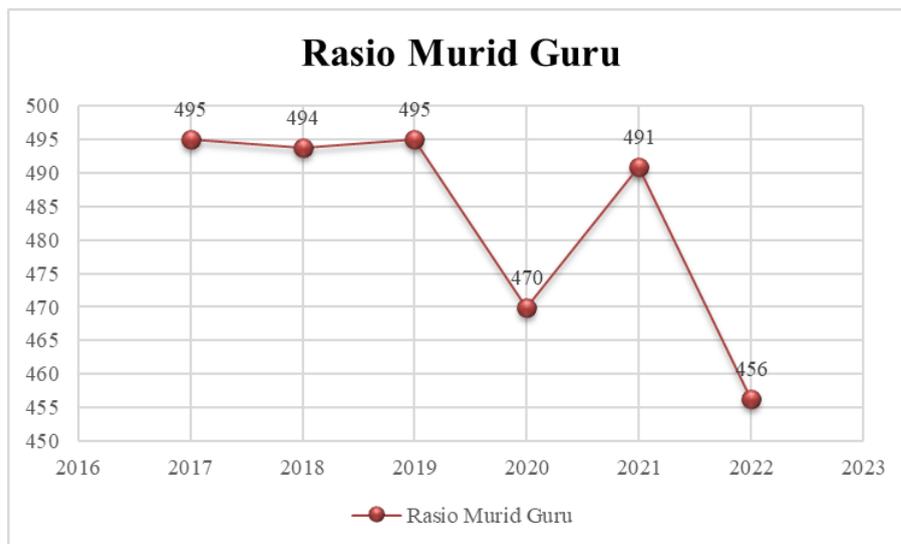
**Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Di Indonesia Tahun 2017-2022  
(Miliar Rupiah )**

*Sumber : djpk.kemenkeu.go.id*

Berdasarkan gambar 1.3 terlihat bahwa dari tahun 2017-2022 pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di Indonesia tertinggi pada tahun 2020 sebesar 138,208.29 miliar rupiah dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terendah

terdapat pada tahun 2017 yaitu sebesar 98.920.05 milyar rupiah. Pengeluaran sektor pendidikan termasuk dalam fungsi alokasi karena pengeluaran sektor pendidikan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik masyarakat. Hal ini secara implisit menunjukkan bahwa jika pengeluaran pemerintah digunakan secara efektif dan efisien maka kebutuhan publik masyarakat salah satunya yaitu pendidikan dapat terpenuhi, sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh pendidikan dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan juga tidak terlepas dari peran penting tenaga pendidik yaitu guru. Namun rendahnya serta tidak meratanya tingkat partisipasi sekolah di Indonesia sehingga menyebabkan ketimpangan pada distribusi guru. Meskipun jumlah guru di Indonesia cukup memadai, namun dari sisi pemerataan dan kualitas masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya sekolah di daerah terpencil, pedesaan, bahkan sekolah di perkotaan masih ada yang kekurangan guru. Rasio murid terhadap guru dapat menunjukkan keefektifan seorang guru dibanding dengan jumlah siswa yang dilayani. Jika rasio tinggi, berarti satu orang guru harus melayani banyak murid. Banyaknya murid yang diajarkan akan mengurangi daya tangkap murid pada pelajaran yang diberikan atau mengirangi efektivitas pengajaran.



**Gambar 1.4**

**Rasio Murid Terhadap Guru di Indonesia Tahun 2017-2022 (Point)**

*Sumber : BPS Indonesia 2022, diolah peneliti*

Berdasarkan gambar 1.4 diatas bahwa rasio murid terhadap guru setiap tahunnya di Indonesia berbeda-beda. Dimana rasio tertinggi terhadap pada tahun 2017 sebesar 495 point dan rasio terendah terlihat 2022 sebesar 456 point. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa telah terjadi ketimpangan rasio terhadap guru. Melihat berbagai ketimpangan yang dihadapi dalam hal mengakses pendidikan tidak terlepas dari faktor kemiskinan penduduk. Dimana terjadiketimpangan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia. Kemiskinan menjadi salahsatu faktor tidak dapatnya melanjutkan pendidikan, karena apabila suatu keluarga memutuskan untuk memberikan pendidikan kepada anaknya maka bersedia untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk pendidikan. Jika tidak memiliki biaya yang cukup untuk pendidikan maka terhambatlah jenjang pendidikannya (Zahra, 2019).

Pendidikan bagi penduduk miskin bukan termasuk kebutuhan primer (Karini, 2018). Jika suatu golongan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan primer maka digolongkan sebagai golongan yang berpenghasilan rendah dan sebahagian kasus tidak dapat melanjutkan sekolah dikarenakan keterbatasan ekonomi.



**Gambar 1.5**  
**Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2017-2022 (Ribu Jiwa)**

*Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022*

Berdasarkan gambar 1.5 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2017-2022 . Jumlah penduduk miskin tertinggi pada tahun 2020 sebesar 27,549.69 ribu jiwa dan jumlah penduduk miskin terendah pada tahun 2019 sebesar 24,785.87 ribu jiwa. Dengan banyaknya penduduk miskin maka akan semakin banyak anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Kawasan miskin memiliki ciri-ciri indeks pendidikan yang rendah karena tingginya biaya pendidikan

dan rendahnya pendapatan membuat penduduk miskin kesulitan dalam memperoleh pendidikan (Manurung & Santoso, 2015).

Pemerataan pendidikan belum dapat diwujudkan terutama pada jenjang pendidikan usia 16-18 tahun karena Angka Partisipasi Sekolah yang semakin menurun dengan bertambahnya usia. Faktor kemiskinan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sebahagian masyarakat usia sekolah tidak dapat mengenyam pendidikan secara maksimal dikarenakan keterbatasan biaya pendidikan dan umumnya terjadi pada tingkatan usia 16-18 tahun yang memiliki tingkat persentase partisipasi sekolah yang sedikit.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Sekolah Di Indonesia**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan perkapita berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia?
2. Apakah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia?
3. Apakah rasio murid terhadap guru berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia?
4. Apakah jumlah penduduk miskin berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh rasio murid terhadap guru terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Ekonomi (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta serta menambah wawasan penulis dalam pembuatan karya ilmiah.
2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan penambah wawasan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan ekonomi dengan demikian diharapkan dapat menentukan kebijakan dengan tepat.
3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan yaitu ilmu ekonomi khususnya untuk mengetahui sejumlah faktor yang mempengaruhi angka partisipasi sekolah di Indonesia.